

## BAB 4

### ANCAMAN MILITER TERHADAP PENGARUH REVOLUSI BOLIVARIAN DI KAWASAN AMERIKA SELATAN

Bab ini akan membahas mengenai kehadiran militer Amerika Serikat di Kolombia berpotensi menimbulkan ancaman terhadap Revolusi Bolivarian di kawasan Amerika Selatan. Pada sub-bab pertama akan membahas mengenai kemenangan Hugo Chavez membawa perubahan di Venezuela melalui gerakan Revolusi Bolivarian yang menjadi 'ideologi' baru melawan kapitalisme di Venezuela. Sub-bab kedua menganalisis mengenai pencapaian revolusioner di Venezuela, terutama di kawasan Amerika Selatan. Sub-bab ketiga menganalisis mengenai kontra-revolusi guna menghambat gerakan Revolusi Bolivarian yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui sebuah kudeta. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Venezuela menggunakan strategi militer ofensif dalam merespon kehadiran militer Amerika Serikat di Kolombia.

#### 4.1. Kemenangan Hugo Chavez dan Jalan Menuju Sosialis Baru

Sejak tergulingnya Jendral Marcos Perez Jimenez pada tahun 1958 dan penarikan militer secara langsung dalam politik negara, Venezuela telah menikmati kekuasaan demokratis, dimana Presiden Romulo Betancourt, presiden dari tahun 1958-1964, meletakkan dasar corak politik yang baru<sup>153</sup>. Venezuela untuk pertama kalinya meratifikasi konstitusi demokrasi pada tahun 1961 dan memberikan hak seluas-luasnya pada masyarakat sipil yang sebelumnya ditolak pada masa kediktatoran.

Pada awal tahun 1960an dan tahun 1970an, Venezuela secara umum menikmati periode pertumbuhan ekonomi yang sehat dari hasil kekayaan minyak bumi. Watak ketidakmerataan dalam ekonomi menunjukkan tanda kesengsaraan pada mayoritas rakyat yang luas. Sementara pada tahun 1965, peningkatan GDP sebesar 8%, sedikitnya 30 persen dari 1,5 juta daerah tempat tinggal di Caracas

---

<sup>153</sup> Richard Gott, *In the shadow of the Liberator: The Impact of Hugo Chavez on Venezuela and Latin America* (London: Verso, 2000), hal. 36.

berada dalam kondisi ‘ranchos’ atau kekumuhan dan 40 dari penduduk Caracas tidak memiliki air . berdasarkan laporan PBB, Caracas pada waktu itu adalah kota yang paling mahal di dunia<sup>154</sup>.

Pada tahun 1973, kandidat dari partai AD Andes Perez terpilih sebagai presiden. Pada masa pemerintahannya, Perez mengeluarkan kebijakan populis yang mulai memperhatikan masyarakat miskin. Perez mengeluarkan kebijakan nasionalisasi terhadap industri minyak dan membentuk Petroleros de Venezuela, S.A (PDVSA), merupakan perusahaan BUMN. Seiring dengan kenaikan harga minyak yang tinggi mengakibatkan pemerintah mendapatkan keuntungan yang besar. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah, diantaranya mulai menaikkan gaji, melakukan pengontrolan harga, barang-barang impor disubsidi, dan utang sebesar \$350 juta dalam bidang pertanian tidak perlu dibayarkan kepada negara.

Venezuela mendapatkan banyak uang dari pendapatan minyak dan mulai memberikan bantuan pinjaman internasional bagi impor negara-negara Amerika Latin melalui *Venezuelan Investment Fund* (VIF), juga menghutangkan uang melalui *Inter-American Development Bank* (IADB). Venezuela mendapatkan kepemimpinan diantara Negara-negara Amerika Latin dan memberikan dukungan dan sokongan independensi di Amerika Latin dari hegemoni Amerika Serikat. Hal ini, berkaitan dengan embargo minyak OPEC, celah Panama, keterlibatan Amerika Serikat dalam menggulingkan Presiden Sosialis Salvador Allende di Chili, mencemari hubungannya dengan Amerika Serikat.

Pada tahun 1976, harga minyak mulai menurun dan anjlok pada tahun 1978. Pengeluaran yang tidak terkendali, *capital flight*, terciptanya inkompetensi, dan korupsi mengakibatkan negara tersebut menjadi negara penghutang. Perez dalam 5 tahun masa pemerintahannya telah menghabiskan banyak uang dan memperburuk keadaan. Dan suara pemilu ditentukan oleh batas tipis yang membuat kekuasaan jatuh pada COPEI.

Harga minyak mulai membaik pada tahun 1980. Presiden Herrera meningkatkan kontrol atas minyak dan kenaikan gaji, namun inflasi tetap tinggi. Seperti halnya pada masa pemerintahan Perez, pada masa pemerintahan Herrera juga mengeluarkan banyak pengeluaran. Antara tahun 1979-1982 terjadi defisit

---

<sup>154</sup> Dawn Gable, *Brief History of Venezuelan Politics*, dalam <http://www.vheadline.com/search.asp>, diakses tanggal 2 Februari 2010.

sebesar \$8 milyar. GDP asli menurun dari 4 tahun terakhir rata-rata 6,1% menjadi 1,2% antara tahun 1979 dan 1983. Pengangguran mulai meningkat sebesar 20% pada tahun 1980<sup>155</sup>.

Pada tahun 1981, harga minyak dunia mulai menurun dan Venezuela memiliki hutang sebesar \$ 32 milyar menjelang tahun 1983. Kepemimpinan PDVSA mulai dipolitisir dan milyaran dollar cadangan dari PDVSA digunakan untuk membayar hutang, guna memperoleh kontrol harga terhadap minyak. Para serikat pekerja (CTV) mulai melakukan berbagai macam pemogokan sepanjang pertengahan tahun 1980an.

Keadaan perekonomian Venezuela mengalami kemerosotan dan kemiskinan semakin meningkat. Partai politik, Partai Sosial Demokrasi/*Accion Democratica* (AD) dan Partai Kristen Demokrasi (COPEI) yang mendominasi pemerintahan sejak tergulingnya Perez Jimenez pada tahun 1958, mulai dilihat sebagai pemerintahan yang korup dan menyalahkan perubahan distribusi kekayaan minyak yang disebabkan oleh institusi dari agenda ekonomi neo-liberal. Lambat laun masyarakat Venezuela mulai tidak percaya terhadap pemerintah<sup>156</sup>.

Pada tahun 1989, Perez dipilih lagi pada tingkat kekecewaan yang meninggi di kalangan rakyat. Pada masa pemerintahan Perez, Venezuela mengalami kondisi perekonomian yang buruk dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi. Perez mulai menempuh paket atau program neoliberal (*El Paquete*) yang disponsori oleh IMF dan Bank Dunia<sup>157</sup>. Privatisasi industri milik negara, penghilangan subsidi-subsidi, devaluasi mata uang dipaksakan ke publik dan semuanya mendapat protes dalam bentuk pemogokan buruh-buruh, aksi-aksi mahasiswa, dan bahkan kerusuhan yang bernuansa kekerasan.

Kenaikan harga gas adalah pemicu terakhir. Pada tanggal 27 Februari 1989, Caracas dan kota-kota lain di Venezuela terjadi kerusuhan secara besar-besaran. Secara spontan, massa mengamuk di jalan-jalan. Kekerasan terjadi dalam bentuk amuk massa yang menghancurkan jendela-jendela kantor pemerintahan,

<sup>155</sup> Fransisco Dominguez, ALBA: America Latin's Anti Imperialist Economic Project, dalam terbitan 21<sup>st</sup> Socialism, diakses dari [http://www.21stcenturysocialism.com/article/alba\\_latin\\_america\\_anti\\_imperialist\\_economic\\_project.html](http://www.21stcenturysocialism.com/article/alba_latin_america_anti_imperialist_economic_project.html), diakses tanggal 2 Februari 2010.

<sup>156</sup> NACLA Report on the Americas XXVII.5 (March/April, 1994) "Report on Venezuela".

<sup>157</sup> Fransisco Domiguez, *Loc. Cit.*, hal. 3.

dan diikuti juga aksi-aksi penjarahan. Kerusuhan tersebut berakhir dengan pembunuhan sekitar 2000 orang oleh polisi dan militer untuk mengatasi kekacauan<sup>158</sup>.

Namun demikian, akibat dari penerapan pasar bebas (neoliberal) yang dilakukan pemerintahan Perez, dari tahun 1990 sampai tahun 1992 Venezuela memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Amerika Selatan, yang disertai dengan tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Pada tanggal 4 Februari 1992, Letnan Kolonel Hugo Chavez Frias melakukan kudeta dan gagal. Ia ditangkap dan dipenjarakan. Chavez akan muncul lagi dengan citra keberanian untuk membawa rakyat keluar dari krisis pemerintahan yang terjebak dalam kebijakan neoliberalisme.

Pada bulan Juli 1998, Chavez dan kawan-kawan seperjuangan membentuk organisasi politik resmi yang dinamakan MVR (*Movimiento Quinta Republica*) atau “Pergerakan Republik Kelima” (*Fifth Republic Movement*). Deklarasi MVR menyatakan: “misinya adalah untuk mengamankan umat manusia dalam komunitas nasional, memuaskan aspirasi individu dan kolektif rakyat Venezuela, dan menjamin kondisi kemakmuran yang optimal bagi bangsa”.<sup>159</sup>

Guna mendukung kekuatan pada pemilihan presiden, Chavez melakukan koalisi dengan *Movimiento al Socialismo* (MAS) dan partai baru sayap kiri *Partia Para Todos* (PPT), dengan membentuk partai baru yang bernama *Polo Patrioco* (PP) merupakan aliansi multi partai populis. Pada pemilihan presiden 1998, Chavez menjadi kandidat presiden dari partai PP. Partai tradisional yang menguasai politik Venezuela, AD dan COPEI kehilangan dukungan dari rakyat Venezuela. Hal ini dikarenakan kebijakan yang gagal dan pemerintahan yang korup.<sup>160</sup> Pada pemilihan presiden tersebut, Chavez menang dengan memperoleh suara 56%. Dan menjadi presiden Venezuela pada tanggal 2 Februari 1999.

Hugo Chavez merupakan seorang mantan letnan kolonel militer, yang pergerakannya didasarkan pada filosofi dan ideologi dari Simon Bolivar, merupakan seorang pembebas besar di Amerika Selatan, yang berusaha untuk

---

<sup>158</sup> Nurani Soyomukti, *Revolusi Bolivarian Hugo Chavez dan Politik Radikal* (Yogyakarta: Resist Book, 2007), hal. 79.

<sup>159</sup> *Ibid.*, hal. 81.

<sup>160</sup> Eva Golinger, *The Chavez Code: Cracking US Intervention in Venezuela* (London: Pluto Press, 2007), hal. 25.

menyatukan benua agar menjadi kekuatan besar melawan kekuatan kapitalisme. Gerakan Chavez berusaha untuk menerapkan ide-ide serupa dengan mendorong unifikasi politik di kawasan Amerika Selatan melalui penciptaan yang berdaulat dan blok ekonomi yang kuat. Konsep tersebut diterima baik oleh rakyat dikarenakan penderitaan rakyat akibat dari sebuah agenda neoliberal yang telah melumpuhkan ekonomi dan peningkatan kemiskinan secara drastis. Sehingga konsep tersebut dinamakan sebagai Revolusi Bolivarian.

Chavez berjanji untuk melakukan perubahan ekonomi dan sosial secara substansial dan signifikan di Venezuela. Perubahan tersebut dapat diterima oleh mayoritas masyarakat Venezuela dalam kurun waktu di mana mereka telah mengalami penurunan drastis standar hidup dan penurunan harga minyak, sebagai negara utama komoditi ekspor.

Dalam mengimplementasikan gerakan Revolusi Bolivarian, Chavez dan para pendukungnya melakukan perubahan undang-undang (konstitusi) Venezuela guna menjamin berjalannya revolusi di Venezuela. Dibawah pimpinan Hugo Chavez, Revolusi Bolivarian telah melahirkan konstitusi baru yang menjadi landasan konstitusional bagi kebijakan-kebijakan yang membawa perubahan struktural di Venezuela.

Konstitusi Venezuela disusun pada tahun 1999 oleh Majelis Konstitusional yang dipilih melalui referendum rakyat. Konstitusi 1999 diadopsi pada bulan Desember 1999 yang menggantikan konstitusi 1961. Konsekuensi pertama dari konstitusi 1999 adalah perubahan nama resmi Venezuela menjadi “Republik Bolivarian Venezuela.”<sup>161</sup>

Perubahan signifikan terlihat dari upaya pemisahan kekuasaan (*separation power*). Hal ini menggantikan tiga cabang pemerintahan dalam republik lama, dimana Republik Bolivarian Venezuela memiliki tiga cabang pemerintahan, yaitu: cabang eksekutif (*the Presidency*), cabang legislatif (*the National Assembly*), cabang yudisial (*the judiciary*), cabang pemilihan (*electoral power*), cabang kewarganegaraan (*citizens' power*).<sup>162</sup> Cabang pemilihan dikepalai oleh Dewan Pemilihan Nasional (*National Electoral Council – CNE*) dan bertanggung jawab terhadap independensi dalam pemilu yang dilakukan ditingkat negara, kotapraja,

<sup>161</sup> Nurani Soyomukti, *Op. Cit.*, hal 105

<sup>162</sup> *Ibid.*

kabupaten, dan propinsi. Sedangkan, cabang kewarganegaraan tersusun oleh dewan keuangan dan penuntut umum yang bertanggung jawab untuk memberikan dan mempertahankan kewarganegaraan guna berhadapan dengan kekuasaan negara Venezuela.

Chavez melakukan reformasi struktur pemerintahan melalui Konstitusi 1999 dengan menambah lama masa jabatan presiden dari 4 tahun menjadi 6 tahun dan masa jabatan presiden paling lama dua kali periode. Reformasi juga dilakukan pada Majelis Nasional yang sebelumnya bersifat bikameral menjadi unikameral dengan menghilangkan kekuatan lembaga legislatif sebelumnya. Sehingga Majelis Nasional yang baru mempunyai satu kamar (*single-chamber*) dengan merubah susunan lama sebelumnya yang memiliki dua kekuatan (bidang) kekuasaan legislatif antara Bidang Deputi (*Chamber of Deputies*) dan Senat.<sup>163</sup> Selain itu, kekuasaan cabang-cabang legislatif dikurangi dan diberikan kepada presiden. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh Chavez memperlihatkan bahwa Chavez ingin mempertahankan kekuasaannya dan menjamin berjalannya proses Bolivarian di Venezuela.

#### **4.2. Pencapaian Revolusioner di Venezuela dan Kawasan Amerika Selatan.**

Terpilihnya Hugo Chavez menjadi Presiden membawa perubahan besar di Venezuela melalui gerakan revolusi Bolivarian. Chavez menyadari bahwa neoliberalisme dijalankan oleh sekelompok kecil elit yang berusaha mengambil keuntungan dengan menjalankan ekonomi yang dikendalikan oleh keputusan sedikit orang (oligarki) dengan mengorbankan mayoritas rakyat. Oleh sebab itulah, salah bentuk perlawanan terhadap neoliberalisme di Venezuela adalah dengan merebut hak-hak segelintir elit dan mengembalikannya pada mayoritas rakyat. Beberapa kebijakan politik yang dilakukan oleh Hugo Chavez dilandaskan pada upaya untuk mengembalikan hak-hak ekonomi, politik, dan budaya kepada rakyat.

Salah satu program penting pemerintahan Chavez adalah menasionalisasikan *Petroleros de Venezuela, S.A* (PDVSA), merupakan perusahaan minyak BUMN, yang awalnya dikuasai oleh para pemodal *Chevron*

---

<sup>163</sup> *Ibid.*

*Corps; Royal Dutch Shell, Repsol, dan Exxon.* Chavez melakukan perubahan perjanjian dengan para pemodal, dimana pengelolaan perusahaan minyak tersebut dikerjakan sendiri oleh kaum buruh (UNT). Dengan melakukan nasionalisasi terhadap PDVSA, berarti dapat mengontrol keuntungan yang didapat dari hasil ekspor minyak. Pemerintahan Chavez juga mengambil alih proyek *Orinoco Belt*. Proyek *Orinoco Belt*, yang bertujuan untuk membangun salah satu cadangan minyak terbesar dunia, sebelumnya dikontrol oleh enam perusahaan asing, seperti ConocoPhillips, Chevron dan Exxon Mobil dari Amerika, bekerjasama dengan BP dari Inggris, Statoil dari Norwegia dan Total dari Prancis.<sup>164</sup> Monopoli yang dilakukan oleh perusahaan asing tersebut akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari proyek tersebut. Sekarang perusahaan minyak negara, PDVSA yang akan mengendalikan sekurang-kurangnya 60% dari proyek-proyek tersebut, dan keuntungan dari proyek-proyek itu akan dikembalikan ke Venezuela. Selain itu, pemerintahan Chavez mulai menaikkan pajak perusahaan.

Dengan keuntungan penjualan minyak dan peningkatan pajak perusahaan, pemerintah membuat berbagai proyek sosial, ekonomi dan kebudayaan yang ditujukan untuk memperbaiki kehidupan rakyat Venezuela. Sejak tahun 2000, Chavez melancarkan perang terhadap *latifundia* (kaum pemilik tanah). Hal ini dikarenakan 5% dari penduduk Venezuela menguasai 80% luas tanah baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan yang kebanyakan dibiarkan kosong dan tidak diolah, sedangkan banyak petani yang tidak memiliki tanah. Menurut Chavez bahwa perang terhadap *latifundia* merupakan pokok dari Revolusi Bolivarian. Revolusi yang tidak memperbaiki pemilikan tanah dengan tidak memberikan tanah kepada para petani, tidak memberikan tanah kepada yang mengerjakan, tidak bisa menamakan diri lagi sebagai revolusi.<sup>165</sup>

Chavez melakukan introduksi jaminan sosial yang diperuntukkan untuk rakyat miskin dan melancarkan gerakan yang diberi nama *Mission Guaicaipuro* yang bertujuan melindungi kehidupan agama, tanah, adat, dan hak-hak asasi penduduk yang kebanyakan terdiri dari suku Indian. Gerakan lainnya diberi nama

<sup>164</sup> A. Umar Said, "Dapatkah Presiden Hugo Chavez Dijatuhkan oleh Washington?", lihat di [http://kontak.club.fr/Dapatkah\\_Presiden\\_Hugo\\_Chavez\\_dijatuhkan\\_oleh\\_Washington.htm](http://kontak.club.fr/Dapatkah_Presiden_Hugo_Chavez_dijatuhkan_oleh_Washington.htm), diakses tanggal 30 Mei 2010.

<sup>165</sup> *Ibid.*

*Mission Robinson* (untuk pemberantasan buta huruf bagi 1,5 juta orang dewasa), *Mission Sucre* (agar kaum muda melanjutkan sekolah), dan *Mission Barrio Adrento* (bertujuan mendirikan dan memperlengkapi rumah sakit dan klinik).<sup>166</sup>

Program-program yang dilakukan oleh pemerintahan Chavez ini mendapat dukungan penuh dari rakyat Venezuela. Namun, mendapat pertentangan dari kelompok pengusaha (Fedecamaras) dan oposisi yang merasa kepentingan mereka terancam akibat penerapan revolusi Bolivarian.

Hugo Chavez dan ide Revolusi Bolivarian menjadi inspirasi bagi kekuatan-kekuatan kiri di Amerika Selatan untuk berjuang melawan neoliberalisme. Ide Revolusi Bolivarian menyebabkan efek domino di kawasan Amerika Selatan dengan terpilihnya tokoh-tokoh sosialis menjadi presiden, diantaranya adalah Lula Da Silva (Brazil; 2001), Nestor Kirchner (Argentina; 2003), Martin Torrijos (Panama; 2004), Tabare Vasquez (Uruguay; 2005), Evo Morales (Bolivia; 2006), Daniel Ortega (Nikaragua; 2006), Michelle Bachelet (Chile; 2006), dan Rafael Correa (Ekuador; 2007).<sup>167</sup>

Selain melakukan perubahan terhadap sektor ekonomi, politik, dan sosial, Chavez juga melakukan perubahan terhadap politik luar negeri Venezuela. Dalam kebijakan luar negeri, Chavez menempuh langkah yang berani dengan melakukan sikap anti-Amerika Serikat dan melakukan penentangan terhadap kebijakan Amerika Serikat di kawasan Amerika Selatan. Chavez banyak berbicara mengenai kekagumannya terhadap Fidel Castro dan ingin membentuk aliansi Venezuela - Kuba. Chavez melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara, diantaranya Rusia, China, Libya, Iran, dan termasuk Irak untuk mematahkan embargo dari Amerika Serikat dan bertemu dengan pemimpin Irak, Saddam Husein. Chavez juga memainkan peranan kunci dalam menyatukan OPEC untuk mengelola produksi minyak dalam rangka stabilisasi harga minyak bumi.

Pada tahun 2001, pertemuan KTT antar negara-negara benua Amerika di Quebec, Kanada, Presiden Chavez menentang terwujudnya *Free Trade of the Americas Act* (FTAA), merupakan sebuah blok perdagangan regional yang

<sup>166</sup> *Ibid.*

<sup>167</sup> Jeremy Bransten, "South America: Rejecting U.S. Prescription Region Tilts Left", dalam <http://www.rferl.org/featurearticle/2006/01/b9f2e5b7a485-41f3-9fbb-b5a6a3ea9ec0.html>, diakses tanggal 19 Oktober 2009.

diusulkan oleh Amerika Serikat. Chavez mulai advokasi terhadap organisasi perdagangan di kawasan Amerika Selatan yang mampu bernegosiasi dengan Amerika Serikat yang mempunyai perekonomian yang kuat. FTAA akan menciptakan sebuah “zona perdagangan bebas” yang terbesar di dunia, mencakup 34 negara di Belahan Barat, termasuk 800 juta masyarakat dunia. Organisasi ini akan memprioritaskan hak-hak perusahaan, kedaulatan negara dihilangkan, dan hanya sedikit atau tidak ada campur tangan pemerintah dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi politik dan urusan internal<sup>168</sup>. Chavez merupakan kepala negara yang paling keras menentang pembentukan FTAA. Chavez membentuk *Alternative Bolivariana Para Las Americanas* (ALBA) sebagai boikot terhadap FTAA. Berbeda dengan FTAA, ALBA mendorong blok perdagangan berorientasi sosial, egaliter dan keadilan bagi kemanusiaan daripada pro-pasar yang selama ini dipergunakan untuk memaksimalkan deregulasi profit.

Selain melakukan pembentukan ALBA yang berlandaskan kerjasama dan integrasi ekonomi diantara negara-negara Amerika Selatan. Venezuela berupaya untuk memperkuat persatuan diantara negara-negara Amerika Selatan dengan membuat dua proyek besar, yaitu Petrosur dan Telesur.<sup>169</sup>

Petrosur dimaksudkan sebagai perusahaan minyak yang mencakup seluruh Amerika Latin yang bertujuan untuk menyatukan industri minyak negara dari berbagai pemerintah untuk menciptakan senjata ekonomi yang dapat menjadi tantangan bagi hegemoni Amerika Serikat. Sedangkan Telesur dimaksudkan sebagai TV seluruh Amerika Selatan yang bertempat di Venezuela dan bertujuan untuk menyediakan berita dari perspektif rakyat Amerika Selatan. Saat ini, televisi CNN di Spanyol mendominasi benua Amerika, yang mencerminkan kepentingan Amerika Serikat. Negara-negara Amerika Selatan, seperti Argentina, Brazil, Bolivia, dan Uruguay telah memberikan dukungan terhadap kedua proyek tersebut.

Saat ini, Chavez tidak hanya menerapkan Revolusi Bolivarian di dalam pemerintahan Venezuela, tetapi juga menyebarkan pengaruh Revolusi Bolivarian di kawasan Amerika Selatan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Chavez

---

<sup>168</sup> Eva Golinger, *Op. Cit.*, hal. 32.

<sup>169</sup> Nurani Soyomukti, *Op. Cit.*, hal. 145

mendapat tantangan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat mulai melakukan langkah-langkah untuk kontra Revolusi Bolivarian.

#### 4.3 Kontra Revolusi Melalui Sebuah Kudeta dan Referendum

Dalam sebuah revolusi selalu mendapat hambatan dan tantangan dari berbagai pihak yang tidak senang dengan adanya revolusi. Begitu juga revolusi yang terjadi di Venezuela, Chavez menghadapi gerakan kontra revolusi yang berasal dari lawan-lawan politik dan Amerika Serikat. Mereka berusaha menggagalkan gerakan Revolusi Bolivarian yang selama ini dibangun oleh Chavez, hal ini dikarenakan kepentingan mereka terganggu akibat berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Chavez.

Amerika Serikat mulai membangun strategi guna menggagalkan Revolusi Bolivarian. Amerika Serikat mulai menghimpun kelompok-kelompok anti Chavitas, seperti Fedecamaras (kelompok pengusaha), CTV (serikat buruh yang berafiliasi dengan AD), partai-partai oposisi (COPEI, AD, dan MAS). Kelompok ini mengalami kerugian akibat perubahan sosial-politik dan ekonomi secara radikal yang dilakukan oleh Chavez.

Pada tahun 2000, *National Endowment for Democracy* (NED), sebuah perusahaan nirlaba Amerika Serikat, menyalurkan dana kepada *American Center for International Labor Solidarity* (ACILS). Sejak tahun 1990an ACILS mempunyai hubungan baik dengan CTV, ACILS memberikan rata-rata dana sebesar 60 ribu dolar AS kepada para serikat pekerja di Venezuela. Tapi pada tahun 2001, terjadi peningkatan pemberian dana sebesar 154,375 dolar AS, yang memiliki misi dan peranan baru terhadap pergerakan serikat dalam membangun negeri.<sup>170</sup>

Misi dan peranan baru tersebut merupakan usaha bersama dengan para pemimpin Fedecamaras, untuk membangun pergerakan yang mampu melengserkan pemerintahan Chavez. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, dengan NED sebagai pemodal utama. Walaupun sebenarnya dana substansial NED berasal dari USAID.

---

<sup>170</sup> Eva Golinger, *Op. Cit.*, hal. 49

Pada tahun 2001, NED telah menghabiskan dana di Venezuela sebesar 877,435 dolar AS.<sup>171</sup> Dengan kata lain, ACILS telah memberikan dana tiga kali lipat kepada CTV. ACILS juga menyalurkan dana kepada *International Republican Institute* (IRI), sebuah LSM Amerika Serikat, untuk diberikan kepada partai *Primerio Justicio* dan partai tradisional lainnya yang ada di Venezuela. Berikut ini dana yang dikeluarkan oleh NED untuk diberikan kepada CTV dan partai tradisional (COPEI, AD, dan *Primerio Justicio*) periode 2000 – 2006, yang berkedok program promosi demokrasi di Venezuela:

**Tabel 4.1. Pemberian Dana Amerika Serikat Terhadap “Promoting Democracy” in Venezuela**

Year	NED in US \$	USAID in US \$
2000	232,831	0
2001	877,435	0
2002	1,698,799	2,197,066
2003	1,046,321	8,903,669
2004	874,384	6,345,000
2005	930,274	5,000,000
2006	2,000,000	7,000,000
Total Public Funds		\$34,175,505

Sumber: [www.globalresearch.com](http://www.globalresearch.com)

Tabel diatas memperlihatkan bahwa NED telah memberikan dana yang cukup besar kepada kelompok anti Chavitas sebelum dan sesudah terjadinya kudeta. Pemberian dana ini diperuntukkan sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan Chavez.

Selain melakukan konsolidasi dengan kelompok Chavitas, Amerika Serikat juga mulai melakukan koordinasi dengan sejumlah panglima militer yang anti terhadap pemerintahan Chavez guna mengatur penggulingan pemerintahan Chavez. Dan Amerika Serikat mengirimkan duta besar baru guna memberikan sentuhan akhir pada kudeta.

<sup>171</sup> *Ibid*, hal. 55

Pada tanggal 25 Februari 2002, Charles Shapiro secara resmi dikirim ke Caracas sebagai Duta Besar Amerika Serikat yang baru. Keputusan Washington untuk mengganti duta besar sebelumnya, Donna Hrinak dengan Shapiro sebagai upaya konsolidasi dengan oposisi guna melakukan strategi menjatuhkan pemerintahan Chavez.<sup>172</sup>

Pada saat Shapiro resmi menjadi Duta Besar di Caracas, tiga perwira militer Venezuela telah secara terbuka mencela Presiden Chavez dan terancam pemberontakan militer. Pada tanggal 7 Februari 2002, Kolonel Angkatan Udara Venezuela Pedro Sota menuntut pengunduran diri Chavez. Langkah Kolonel Sota tersebut diikuti hari berikutnya oleh Garda Nasional Capitan Pedro Flores, yang mengklaim sebagian besar mayoritas pasukan bersenjata Venezuela bersiap untuk melawan pemerintah. Kemudian, pada tanggal 18 Februari, Wakil Laksamana Carlos Molina Tamayo menuduh Presiden Chavez "berusaha untuk memaksakan suatu rezim totaliter di Venezuela dan menempatkan bangsa dalam bahaya dengan meminta hubungan lebih dekat ke Kuba dan menjauhkan diri dari Amerika Serikat". Dia menuntut pengunduran diri Chavez dan berbicara tentang "meningkatkan pemberontakan militer di angkatan bersenjata"<sup>173</sup>.

Pada awal bulan Februari, kelompok oposisi telah mengadakan beberapa protes besar, mengumpulkan ratusan di jalan-jalan untuk menuntut pengunduran diri Presiden Chavez. Pada 31 Januari 2002, gereja Katolik memberikan dukungan terhadap oposisi, menolak untuk berdialog dengan pemerintah dan bahkan mengekspresikan dukungan bagi gerakan oposisi. Pemberontakan militer secara umum, dan khususnya posisi Wakil Laksamana Molina Tamayo, merupakan indikator yang jelas bahwa situasi ini menjadi lebih tidak stabil setiap hari. Rumor kudeta yang mungkin mulai beredar di seluruh negeri.

Pada tanggal 11 April 2002, CTV, Fedecamaras, dan partai-partai oposisi yang didukung NED menyelenggarakan pawai dan unjuk rasa besar-besaran di Istana Presiden, Miraflores. Aksi unjuk rasa tersebut menuntut pengunduran diri Chavez sebagai Presiden Venezuela. Pada waktu yang bersamaan para pendukung Chavez juga melakukan demonstrasi guna mendukung pemerintahan Chavez. Namun terjadi bentrokan antara pendukung anti Chavez dengan polisi anti huru

---

<sup>172</sup> <http://indonesia.handsoffvenezuela.org/?p=442>, diakses tanggal 29 Maret 2010

<sup>173</sup> *Ibid.*

hara yang mengakibatkan sedikitnya 12 orang tewas dan sebanyak 100 orang lagi cedera saat polisi anti-huru hara membubarkan kerumunan orang yang menentang Chavez.<sup>174</sup>

Presiden Venezuela Hugo Chavez dipaksa mundur oleh para pemimpin militer yang marah akibat kerusuhan berdarah yang menewaskan sedikitnya 12 orang di negara Amerika Selatan tersebut sehari sebelumnya. Jenderal Angkatan Darat Efrain Vasquez mengkonfirmasi laporan televisi *Globovision* bahwa Chavez telah mundur dari jabatannya sebagai presiden. Kerumunan orang memenuhi jalan-jalan ibukota negeri itu untuk merayakan tergulingnya Chavez, tokoh sayap-kiri dan nasionalis yang telah terpilih dengan dasar kerakyatan tapi upaya pembaruannya mendapat penentangan. Sebanyak 500.000 orang telah berunjuk rasa guna menentang Chavez. Dan terjadi bentrokan pada unjuk rasa tersebut yang mengakibatkan 12 orang tewas ketika polisi anti-huru hara dan satuan Pengawal Nasional bentrok dengan pengunjuk rasa. Kejadian itu dilaporkan tak dapat diterima oleh para jenderal dan laksamana, dan sebanyak 10 jenderal menuntut Chavez mundur. Vasquez mengeluarkan pernyataan bahwa penindasan terhadap pengunjuk rasa melanggar “hak asasi manusia yang didukung undang-undang dasar”.<sup>175</sup>

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Negara Amerika Latin, Jenderal Luis Rincon telah menuntut pengunduran diri Chavez. Rincon mengatakan, Venezuela memerlukan pemilihan umum baru guna menyelesaikan krisis tersebut. Pedro Carmona ditunjuk sebagai Presiden baru oleh militer. Carmona yang diangkat menjadi presiden kemudian membubarkan Kongres, Mahkamah Agung, Konstitusi, dan institusi lainnya. Tindakan tersebut justru menyurutkan dukungan terhadap Carmona. Sekitar satu juta buruh yang beberapa hari sebelum terjadi kudeta melakukan unjuk rasa massal yang dipimpin Carmona, menarik dukungannya karena tindakan drastis Carmona tersebut.<sup>176</sup>

<sup>174</sup> <http://indonesia.handsoffvenezuela.org/?p=442>, diakses tanggal 29 Maret 2010.

<sup>175</sup> Koran Tempo (online), “Kudeta di Venezuela”, lihat di <http://www.korantempo.com/news/2002/4/18/Internasional/39.html>, diakses tanggal 29 Maret 2010.

<sup>176</sup> Jurnal Arah Kiri, “Rangkain Pemberitaan Media Soal Kudeta Kontra-revolusi Terhadap Pemerintahan Revolusioner Chavez”, lihat di <http://lmnd.wordpress.com/2007/08/12/rangkain-pemberitaan-media-soal-kudeta-kontra-revolusi-terhadap-pemerintahan-revolusioner-chavez/>, diakses tanggal 29 Maret 2010.

Namun, kudeta hanya berlangsung 48 jam. Chavez berhasil kembali ke tampuk kekuasaan sebagai Presiden Venezuela. Berhasilnya Chavez kembali ke tampuk pemerintahan antara lain dikarenakan militer terpecah. Sebagian jenderal mendukung Carmona, namun sebagian besar prajurit dan perwira menengah masih loyal kepada Chavez. Selain itu, dikalangan kelompok masyarakat miskin pun Chavez sangat populer, sehingga ketika dia digulingkan, ribuan orang melakukan unjuk rasa agar dia dikukuhkan kembali menjadi presiden.

Amerika Serikat diduga terlibat dalam kudeta yang terjadi di Venezuela. Hal ini terlihat dari pernyataan juru bicara Presiden Bush, Ari Fleischer yang mengumumkan pemerintah Amerika Serikat memberikan dukungan kepada “pemerintah Carmona” dan hukuman atas "mantan Presiden" Chavez yang telah menggunakan kekerasan yang memaksa Chavez untuk mengundurkan diri.<sup>177</sup> Pada kenyataannya, Gedung Putih, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dan kedutaan Amerika Serikat di Caracas telah menerbitkan laporan yang sama, yang isinya menyalahkan Chavez atas kekerasan yang terjadi dan mengakui Carmona sebagai pemimpin yang sah:

*Let me share with you the administration's thought about what's taking place in Venezuela. It remains a somewhat fluid situation. But yesterday's events in Venezuela resulted in a change in the government and the assumption of a transnational authority until new election can be held.*

*The details still are unclear. We know that the action encouraged by the Chavez government provoked this crisis. According to the best information available, the Chavez's government suppressed peaceful administrations. Government supporters, on orders from the Chavez government, fired on unarmed, peaceful protestors, resulting in killed and 100 wounded. The Venezuelan military and the police refused to fire on the peaceful demonstrators and refused to support the government's role in such human right violations. The government also tried to prevent independent news media from reporting on these events.*

*The results of these events are now that President Chavez has resigned the presidency. Before resigning, he dismissed the vice president and the cabinet, and a transitional civilian government has been installed. This government has promised early elections.*

---

<sup>177</sup> Eva Golinger, *Op. Cit.*, hal. 73.

*The United State will continue to monitor events. That is what took place, and the Venezuelan people expressed their right to peaceful protest. It was a very large protest that turned out. And the protest was met with violence.*<sup>178</sup>

Berdasarkan tilgram diatas menjelaskan bahwa peran Amerika Serikat tampak menyakinkan dunia bahwa Chavez penghasut kekerasan, sehingga membenarkan penggulingan terhadap Chavez. Pada kenyataannya, menurut Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahwa Chavez mengundurkan diri dan tidak terjadi pemecatan terhadap diri Chavez. CIA mengetahui mengenai kudeta yang terjadi Venezuela dan melaporkannya ke Departemen Luar Negeri, Badan Keamanan Nasional, dan pejabat tingkat atas lainnya di Washington mengenai rencana rincian kudeta. Gedung Putih mengetahui oposisi dan perwira militer pembangkang berencana untuk menggulingkan Chavez dengan memanfaatkan kekerasan dalam barisan oposisi dan menangkap presiden. Fakta bahwa peristiwa kudeta dimainkan hampir identik untuk membuat rencana sederhana bagi Amerika Serikat agar siap dengan respon yang akan membantu melegitimasi pemerintahan kudeta.

Amerika Serikat melakukan penekanan terhadap negara-negara lain di kawasan Amerika Selatan untuk mengakui Carmona sebagai pemerintah yang sah. Amerika Serikat, yang didukung oleh Kolombia dan El Salvador, berusaha untuk meyakinkan negara-negara lain pada waktu pertemuan di KTT Rio agar memberikan pernyataan mengakui Carmona sebagai presiden baru Venezuela. Negara-negara lain di kawasan tersebut tidak hanya menolak untuk tunduk pada tekanan Amerika Serikat, namun negara-negara tersebut juga memutuskan untuk memberikan pernyataan mengutuk pemecatan Presiden Chavez secara ilegal.<sup>179</sup>

Amerika Serikat merupakan salah satu negara di dunia yang buru-buru untuk menilai peristiwa kekacauan 11 April dan secara terbuka memuji dan mengakui Carmona sebagai presiden yang sah. Adanya fakta bahwa pejabat pemerintah Amerika Serikat telah mempersiapkan Carmona selama berbulan-

<sup>178</sup> Fairness in Accuracy and Reporting (FAIR) dikeluarkan oleh media konsultasi pada tanggal 18 April 2002 dengan judul "US Papers Hail Venezuelan Coups as Pro-Democracy Move", liat di [www.venezuelafoia.org](http://www.venezuelafoia.org), diakses tanggal 1 April 2010.

<sup>179</sup> Naomi Klein, *Guardian*, 18 February 2003, Testimony taken directly from Andres Izarra. See also "The Media Against Democracy: Venezuela highlights the threat to freedom from corporate control," lihat di [www.guardian.co.uk](http://www.guardian.co.uk), diakses tanggal 30 Maret 2010.

bulan untuk menjadi Presiden Venezuela, dan langsung menjelaskan tingkat kepercayaan mereka kepadanya. Hal ini menjadi bukti keterlibatan Amerika Serikat dalam menggulingkan pemerintahan Chavez melalui sebuah kudeta.

Kegagalan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Chavez merupakan preseden buruk bagi lawan politik Chavez dan Amerika Serikat. Meskipun demikian, pihak oposisi dan Amerika Serikat tidak berhenti melancarkan aksi perlawanan. Pihak oposisi mencoba melengserkan pemerintahan Chavez melalui permintaan referendum.

Berdasarkan mekanisme pemanggilan referendum yang diperkenalkan ke dalam hukum Venezuela pada tahun 1999, didasarkan pada Konstitusi baru yang disusun oleh Majelis Konstituante Nasional dan disetujui oleh para pemilih dalam pemanggilan referendum. Berdasarkan ketentuan, seorang pejabat terpilih dapat dikenakan pemanggilan referendum jika mengumpulkan tanda tangan petisi dari 20% dari pemilih yang sesuai. Pasal yang menyatakan ketentuan referendum:

*Article 72: All [...] offices filled by popular vote are subject to revocation. Once one-half of the term of office to which an official has been elected has elapsed, a number of voters representing at least 20% of the registered voters in the affected constituency may petition for the calling of a referendum to revoke that official's mandate. When a number of voters equal to or greater than the number of those who elected the official vote in favour of the recall, provided that a number of voters equal to or greater than 25% of the total number of registered voters vote in the recall referendum, the official's mandate shall be deemed revoked and immediate action shall be taken to fill the permanent vacancy as provided for by this Constitution and by law.*

*Article 233: The President of the Republic shall become permanently unavailable to serve by reason of any of the following events: death; resignation; [...] recall by popular vote. [...] When the President of the Republic becomes permanently unavailable to serve during the first four years of his constitutional term of office, a new election by universal suffrage and direct ballot shall be held within 30 calendar days. Pending the election and inauguration of the new President, the Executive Vice President shall take charge of the Presidency of the Republic. In the cases described above, the new President shall complete the current constitutional term of office. If the President becomes permanently unavailable to serve during the last two years of his*

*constitutional term of office, the Executive Vice President shall take over the Presidency of the Republic until the term is completed.*<sup>180</sup>

Berdasarkan Konstitusi pasal 72 dan 233 bahwa kelompok oposisi diharuskan mengumpulkan petisi sebanyak 20% dari jumlah penduduk Venezuela. Apabila sudah mendapatkan 20% tandatangan, maka dapat dilakukan pemanggilan referendum terhadap Presiden.

Pada tahun 2002, kelompok oposisi bekerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat membentuk *Sumate*, sebuah asosiasi masyarakat sukarelawan Venezuela. NED memberikan dana sebesar 31, 000 dolar AS kepada *Sumate* untuk memberikan “pendidikan politik” kepada pemilih Venezuela.<sup>181</sup> Pendidikan politik ini dimaksudkan untuk mempromosikan mengenai proses referendum konstitusional. Chavez mengetahui *Sumate* mendapat dana dari Kongres Amerika Serikat, dan Chavez menyampaikan bahwa “ada pengkhianatan dan konspirasi besar yang akan terjadi di Venezuela dan Amerika Serikat merupakan dalang dari semua ini”.<sup>182</sup> Amerika Serikat tentu saja membantah bahwa pernyataan Chavez tersebut.

*Sumate* mengumpulkan petisi yang ditandatangani oleh rakyat Venezuela. Pada tahun 2003, *Sumate* telah berhasil mengumpulkan sebanyak 3,2 juta tandatangan dari pemilih Venezuela. Petisi tersebut diberikan kepada *National Electoral Council* (CNE). Setelah melalui verifikasi, petisi tersebut disahkan dan diadakanlah pemanggilan referendum pada tanggal 15 Agustus 2004.

Beberapa minggu sebelum pemanggilan referendum, mantan presiden Andres Perez dalam sebuah wawancara dengan stasiun BCC menyatakan bahwa referendum ini hanyalah cara lawan untuk melengserkan Chavez dari jabatannya sebagai presiden, dan isu kekerasan merupakan “senjata” yang dapat digunakan untuk menjatuhkan Chavez.<sup>183</sup>

<sup>180</sup> Constitution Of The Bolivarian Republic Of Venezuela, lihat di [www.mci.gob.ve](http://www.mci.gob.ve), diakses tanggal 1 Juni 2010.

<sup>181</sup> Robert Jensen, “U.s. Supports Anti-democratic Forces In Venezuela Recall” <http://www.venezuelanalysis.com/2004/0811/p07s01-woam.html>

<sup>182</sup> *Ibid.*

<sup>183</sup> Julian Borger, “Violence Needed Against Chavez, Venezuela Opposition Leader Says. Dictatorship Must Follow”, lihat di <http://www.venezuelanalysis.com/2004/0811/p07s01-woam.html>, diakses tanggal 1 Juni 2010.

Pada tanggal 15 Agustus 2004, referendum dilaksanakan di Venezuela. Referendum ini diawasi oleh *Carter Center* dan badan pengawas internasional lainnya. Berikut ini tabel 4.2 yang menjelaskan detail hasil referendum 2004:

**Tabel 4.2 Hasil *Recall* Referendum Venezuela Periode 2004**

**Hugo Chávez's Election  
Results - 2004 recall referendum**

Recall Hugo Chávez?

Candidate	Votes	%
No	5,800,629	59%
Yes	3,989,008	41%
Non-voting	4,222,269	30%

Sumber: CNE data<sup>184</sup>

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa Hugo Chavez dapat kembali berkuasa menjadi Presiden Venezuela. Masyarakat Venezuela tidak begitu antusias mengikuti pemilihan pemanggilan referendum ini. Terbukti sekitar 30% masyarakat Venezuela tidak mengikuti pemilihan referendum. Hasil pemanggilan referendum tersebut telah disahkan oleh *Carter Center* dan badan pengawas internasional lainnya. Setelah pengumuman hasil referendum dimenangkan oleh pihak Chavez, pemerintah Amerika Serikat baru mengutuk kudeta yang dilakukan oleh kelompok oposisi pada tahun 2002.

Berbagai strategi telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan kelompok oposisi untuk menjatuhkan pemerintahan Chavez. Namun, strategi tersebut gagal dikarenakan Chavez mendapat dukungan yang kuat dari kelompok Chavitas dan rakyat Venezuela.

<sup>184</sup> CNE, "Referendum Presidencial 2004" lihat di [http://www.cne.gov.ve/referendum\\_presidencial2004/](http://www.cne.gov.ve/referendum_presidencial2004/)

### 3.4. Kesimpulan

Kemenangan Hugo Chavez pada pemilu presiden tahun 1998, membawa perubahan besar terhadap rakyat Venezuela. Chavez mendasarkan politik pemerintahannya menurut cita – cita dan prinsip – prinsip Simon Bolivar. Pemerintahan Chavez menggariskan politik yang diinspirasi oleh gagasan-gagasan Bolivar yang kemudian dikembangkan menjadi dasar kebijakan dalam memerintah Venezuela. Berbagai kebijakan diterapkan oleh Chavez diantaranya adalah menasionalisasikan PDVSA, menaikkan pajak pendapatan, program pendidikan gratis, dan memperbaiki pemilikan tanah dengan memberikan tanah kepada para petani yang tidak bertanah.

Selain melakukan perubahan terhadap sektor ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dalam kebijakan luar negeri, Chavez menempuh langkah yang berani dengan melakukan sikap anti-Amerika Serikat dan melakukan penentangan terhadap kebijakan Amerika Serikat di kawasan Amerika Selatan. Selain itu, mendorong unifikasi politik di kawasan Amerika Selatan melalui penciptaan yang berdaulat dan blok ekonomi yang kuat dengan mendorong terbentuknya *Alternative Bolivariana Para Las Americanas* (ALBA) sebagai boikot terhadap *Free Trade of Americas Act* (FTAA).

Keberhasilan Presiden Hugo Chavez dalam menjalankan pemerintahan sosialis baik di dalam maupun luar negeri menjadi inspirasi bagi kekuatan-kekuatan kiri di negara-negara Amerika Selatan. Hal ini terlihat dari semakin menguatnya tokoh -tokoh sosialis sebagai presiden, diantaranya di negara Bolivia, Brazil, Argentina, Ekuador, Paraguay, Chile, Panama dan Nikaragua.

Langkah-langkah yang dilakukan Chavez untuk menerapkan Revolusi Bolivarian di kawasan Amerika Selatan mendapatkan tantangan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat melakukan berbagai upaya untuk menghambat proses Bolivarian. Amerika Serikat mulai mengumpulkan kelompok anti chavitas, seperti kelompok pengusaha (Fedecamaras), partai oposisi, dan kelompok buruh (CTV). Mereka mengalami kerugian akibat penerapan Revolusi Bolivarian yang diterapkan di Venezuela.

Berbagai strategi dilakukan untuk menjatuhkan pemerintahan Chavez diantaranya melakukan kudeta dan referendum. Namun kedua usaha tersebut

gagal, karena adanya dukungan yang kuat oleh rakyat Venezuela terhadap pemerintahan Chavez. Pemerintahan Chavez menyakini bahwa ada keterlibatan pemerintah Amerika Serikat dalam kudeta dan referendum yang terjadi di Venezuela.

Oleh sebab itu, pemerintahan Chavez menggunakan strategi militer ofensif dalam merespon kehadiran militer Amerika Serikat di Kolombia. Chavez berkeyakinan bahwa kehadiran militer Amerika Serikat di Kolombia hanya strategi untuk menjatuhkan pemerintahannya.

